



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : IV (empat)
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Hukum dan HAM RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 17 Maret 2021
Pukul : 10.10 WIB s.d. 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : 1) Membahas evaluasi kinerja tahun 2020
2) Membahas program prioritas kinerja tahun 2021
3) Membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan terhadap kesimpulan rapat kerja sebelumnya
- Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
37 dari 53 orang Anggota Komisi III dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
3. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio (virtual)
2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
3. Trimedya Panjaitan (virtual)
4. M. Nurdin
5. Gilang Dhielafararez (virtual)
6. Idham Samawi
7. Bambang DH (virtual)
8. Arteria Dahlan
9. I Wayan Sudirta (virtual)
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin (virtual)

/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
2. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T. (virtual)
3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
5. Supriansa, S.H., M.H

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. (virtual)
3. Muhammad Rahul
4. Rahmat Muhajirin, S.H
5. Bimantoro Wiyono, S.H. (virtual)

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si
2. Ary Eghani Ben Bahat, S.H

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Moh Rano AL Fath, S.H., M.H,
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
3. Heru Widodo, S.Psi

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H
2. H. Agung Budi Santoso, S.H., M.H. (virtual)
3. Dr. Benny Kabur Harman, S.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. KH. Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H
2. H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

B. Undangan:

1. Menkumham RI beserta jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT/F.PAN (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Abang Sahroni Wakil Pimpinan
beserta para Anggota Komisi III yang berhadir serta yang ikut secara virtual
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran
Hadirin yang saya muliakan

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya jugalah kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI secara fisik dan virtual dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat kerja hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir secara fisik dan virtual sebanyak 20 (dua puluh) orang dari 7 (tujuh) Fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Selanjutnya kami menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja pada hari ini:

1. Mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi III DPR RI
2. Tanya jawab
3. Kesimpulan dan terakhir
4. Penutup

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 11.30 Pak Menteri?
Bagaimana setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati

Evaluasi kinerja Kementerian atau Lembaga merupakan laporan terhadap akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian atau Lembaga atas target kinerja dan penggunaan anggaran serta perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian program kerja Kementerian atau Lembaga tersebut. Pada kesempatan ini Komisi III DPR RI perlu

mendapatkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan target kinerja dan pencapaian selama tahun 2020, serta apa program prioritas yang telah berhasil dilaksanakan dan apa yang telah direncanakan pada tahun 2021 ini. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan penjelasannya.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu

Namo buddhaya.

Yang saya hormati Pimpinan

Pak Pangeran, Pak Sahroni dan para Anggota Komisi III

Terima kasih atas undangan rakernya, mohon maaf kami menunda memohon penundaan waktu dari Senin hari ini. Terima kasih atas respon yang baik dari Pimpinan dan Anggota untuk menerima bahwa raker dapat kita lakukan pagi ini.

Pertama kami akan tentunya seperti biasa akan menjawab lima pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III dan nanti dalam tanya jawab kami terbuka untuk menyampaikan atau menerima pertanyaan-pertanyaan dari Pimpinan maupun Anggota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Evaluasi pembentukan perundang-undangan dan dalam program tahun 2020 pemerintah saat ini sedang menyusun ada pengantar tiga rencana undang-undang, lima Rencana Undang-Undang prioritas 2020 dan ada penyusunan RPP. Penyusunan Perpres yang masuk dalam tentunya RPP dan Perpres yang sudah masuk dalam proksun kita, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan seperti tertera ada diatas ini cukup banyak yang sedang kita lakukan, yang sudah kita lakukan selama tahun 2020.

Dan dalam berikutnya disini dapat *slide* berikutnya kita lihat bagaimana evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang masuk lembaran negara 312 peraturan perundang-undangan, tentunya ada PP, ada undang-undang, ada peraturan perundang-undangan lainnya dari berbagai kementerian lembaga. Ada berita negara dan tambahan lembaga negara dan dari keterangan Presiden dibidang politik ada 9 keterangan, dibidang kesejahteraan rakyat 19 dan dibidang perekonomian 39. Yang ada uji materi di pengadilan satu dikabulkan, ditolak 18, permohonan tidak diterima 28, ditarik kembali oleh pemohon 9 dan belum diputuskan 51.

Dalam program perkembangan pembahasan rencana undang-undang usul pemerintah RUU Pemrakasa Pemerintah 2 (dua) rencana undang-undang telah ditetapkan, 3 (tiga) menunggu surpres, 5 (lima) dalam penyusunan di internal pemerintah dan 5 (lima) rencana undang-undang

sedang dibahas di DPR RI. Dan untuk rencana kerja tahun 2024 kita mengarah kepada pembaruan substansi hukum, mendorong penyusunan perundang-undangan yang berkualitas dan menjadi prioritas nasional, tentunya juga ini didorong dimungkinkan kalau kita mempunyai perancang yang tangguh maka peningkatan kompetensi perancang lagi sekarang peraturan-peraturan daerah melalui revisi yang kita lakukan di Undang-Undang Nomor 12 perlu peningkatan kompetensi perancang undang-undang. Ada pikiran-pikiran untuk terus melihat, menyederhanakan dan memungkinkan kita kalau nanti ada undang-undang yang bisa kita lakukan secara omnibus pengalaman kita Undang-Undang Cipta Kerja dapat kita lakukan barangkali ini menjadi preseden yang dapat dilakukan.

Penguatan pelaksanaan harmonisasi antar kementerian kita lakukan dan juga dalam penyusunan perundang-undangan tentunya kita melibatkan masyarakat baik melalui *focus group discussion*, meminta masukan aspirasi dari daerah dan lain-lain. Di daerah sekarang di kantor-kantor wilayah kita membuat *law and human rights center*, termasuk Perda, juga termasuk pelayanan masyarakat dalam bidang HAM dan lain-lain, tentunya peningkatan pengelolaan dukungan manajemen dari Dirjen PP dan lain-lain. Tahun 2021 target penyusunan perundang-undangan ada 8 (delapan) dari pemerintah. RPP yang barang kali kita lakukan ada RPP tentang kekayaan intelektual, RPP tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, ini barang kali merespon apa yang berkembang belakangan ini. Perubahan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, ini barang kali ada penyusunan Perpres dan dan lain-lain.

Dibidang keimigrasian Bapak/Ibu sekalian, pelaksanaan pengawasan tentunya pasca Covid kita mengambil kebijakan membatasi orang asing dan juga orang Warga Negara Indonesia terjadi kemunduran yang cukup signifikan yang berangkat ke luar negeri dan ini disamping memukul para wisata kita tentunya kita harapkan pandemi Covid-19 ini dapat kita benar-benar secara bangsa dapat kita selesaikan atau kita tangani dengan baik, apalagi dengan program vaksinasi sekarang ini. Kita terus tetap meningkatkan *tempora* kita, dalam *tempora* penindakan administratif ada sekitar 5.105 dan yang *pro justitia* ada 58.

Dalam hal pelayanan masyarakat kita mengenalkan inovasi unggulan kita *eazy passport*, *passport* simpati e-visa dan sistem antrian kita, kita perbaiki secara terus menerus. Pada saat tahun 2020 kita betul-betul PNBB kita dari *passport* dan dari keimigrasian cukup menurun baik karena *passport* tidak banyak orang Indonesia yang berencana *passport* apalagi umroh, haji juga dibatasi, maka kami mencoba membuat apa yang dikatakan *eazy passport* dan *passport* simpatik mengunjungi kantor-kantor, bekerja sama dengan perbankan bahkan ke DPR RI pernah kita datang dalam rangka pelayanan *passport* jadi sistem jemput bola. Dalam reformasi birokrasi di keimigrasian 27 satuan kerja kita memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan 8 satuan kerja memperoleh predikat WBBM. Ini barangkali wilayah birokrasi bersih melayani ini 62 satuan kerja cukup baik, 8 WBBM 62

satuan kerja memperoleh prestasi pelayanan publik berbasis HAM artinya kita menyediakan pelayanan-pelayanan yang berbasis HAM.

Data capaian kinerja dalam perlintasan orang asing yang keluar 4.848.977 itu yang keluar, yang masuk ke Indonesia 4.420.000 berarti ini devisit lebih banyak yang keluar dari pada yang masuk karena apa, karena memang kita membatasi jumlah masuk karena Covid-19. Pemberian izin tinggal 268.000, penerbitan *passport* 1.382.313, pelayanan penerbitan visa sebanyak 145.000 dan penundaan keberangkatan PMI non prosedural, prosedural sebanyak 165. Kendala kita di dalam fungsi dan tugas keimigrasian banyak orang asing tidak dapat keluar wilayah seperti di Bali kita terpaksa harus memberikan pelayanan khusus kepada mereka perpanjangan visa dan tentunya ini betul-betul karena Covid-19 yang sampai sekarang juga masih orang-orang asing yang tidak dapat keluar tetap kita beri fasilitas. Akibatnya penurunan PNBB menjadi tidak dapat terelakan.

Pelaksanaan APBN karena ada *refocusing* jadi target-target yang kita targetkan pada saat kita membahas APBN 2020 ada *refocusing*, ada pandemi Covid dan lain-lain membuat juga pelayanan kita kantor *work from home* disamping ada karyawan-karyawan kita yang terpapar virus berkali-kali kita *lockdown* kantor jadi ini tentunya membuat pelayanan kita kadang-kadang terganggu. Namun demikian secara *over all* dapat kami sampaikan selama tahun 2020 kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun tentunya dengan keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi Covid-19.

Nah, arah kebijakan di Dirjen Keimigrasian ada kebijakan pengamanan negara di TPI dan perbatasan kita sedang memikirkan pengetatan-pengetatan tentunya diperlintasan-perlintasan kita, yang paling sulit di PLBN di perbatasan Papua masih banyak laporan dari Kakanwil Papua kemarin masih banyak perlintasan kita yang kita tidak dapat tempatkan orang karena fasilitas yang sangat minim dan kita harus bekerja sama dengan TNI dalam soal-soal seperti itu. Tahun 2021 kita terus mengembangkan integrasi manajemen pengelolaan perbatasan atau *integrated border control management rearrival registration* jadi sebelum sebelum sampai sudah diregistrasi ini dan uji *passport*.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri mungkin apa yang Pak Menteri sampaikan sudah ada di paparan ini. Mungkin kita kepengen mendengar isu-isu yang menjadi perhatian publik saja Pak.

Silakan.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Baik jadi Bapak/Ibu sekalian,

Di PAS barang kali nanti kalau ada data-data yang dari ini di data kita lengkap nanti kalau ada teman-teman dan apa yang hendak ditanyakan dari paparan yang kami sampaikan persilakan beberapa persoalan di PAS,

imigrasi dan lain-lain tetap klasik tapi kami terus berupaya perlu kami sampaikan dalam rangkaian narkoba kita sudah mengirimkan ke Nusakambangan 643 bandar narkoba, akibatnya sekarang lapas maksimum security dan di Nusakambangan sudah penuh dalam rangka ini itu kita akan segera membangun tambahan di Nusakambangan.

Terkait Rencana Undang-Undang KUHP pidana Bapak/Ibu sekalian kami sudah berbicara, kita sudah berbicara mengenai hal ini ada keinginan kita termasuk PAS secara bertahap kita akan evaluasi nanti penyelesaian prolegnas kita dipertengahan tahun nanti kita lihat secara bertahap dan Komisi III sudah bersurat ke kami dan kami sudah menjawab sebelumnya mengenai hal ini dan kita sudah pernah rapat khusus dan mencari coba jalan keluar mengenai hal ini.

Bapak/Ibu sekalian

Beberapa hal yang disampaikan ke kita belakangan ini barang kali yang menjadi catatan penting ada yang menjadi pertanyaan kita misalnya termasuk pertanyaan di publik adalah misalnya soal yang isu-isu aktual. Kalau RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan barang kali kita sudah sepakat Pak Ketua. Nah yang barang kali permasalahan yang ingin kami sampaikan ada juga catatan-catatan tentunya nanti kami akan sampaikan tentang permasalahan kewarganegaraan Bupati di Raijua atas nama Orient masalah kewarganegaraan. Tentunya Pak Santoso juga barang kali ada masalah ini di Partai Demokrat masalah Partai Demokrat. Ini Pak Benny yang lebih dulu apa, yang mana dulu terserah saja. Saya ingin sampaikan karena saya barang kali yang soal Demokrat nanti biar dipertanyakan saja.

Yang perhatian publik Pak Ketua adalah tentang permasalahan kewarganegaraan Bupati terpilih Orient Riwu Kore. Berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Amerika bahwa beliau dinyatakan memegang *passport* itu resmi, dari pertanyaan surat yang disampaikan oleh Bawaslu dan dari Direktorat Jenderal Kependudukan diperoleh informasi bahwa saudara Orient masih tercatat sebagai WNI dengan KTP dan kami menanyakan langsung melalui sambungan telepon melalui Dirjen AHU benar bahwa dia memiliki *passport* Amerika bahkan juga memiliki *passport* Indonesia. Diketahui *passport* Amerikanya itu akan berakhir tahun 2027, *passport* Indonesiannya akan berakhir April 2024. Permasalahannya adalah beliau itu adalah menikah dengan seorang warga negara Amerika mempunyai anak tentara negara Amerika dan bekerja di proyek strategis di Amerika dan ini barang kali memungkinkan dia mendapat kewarganegaraan lebih mudah, disamping menikah dengan warga negara Amerika juga bekerja dalam satu proyek strategis cukup penting di Amerika sehingga memungkinkan dia dengan mudah dapat memperoleh kewarganegaraan di Amerika.

Pada tanggal 16 yang lalu bulan Februari telah diadakan rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Polda, NTT, Dirjen Imigrasi dan Dirjen AHU. Dari hasil rapat tersebut dinyatakan bahwa kepastian status kewarganegaraan saudara Orient menjadi penting untuk menindak lanjuti

pelantikan beliau. Perlu diinformasikan bahwa Bupati berakhir tanggal seharusnya dilantik 17 Februari. Kemudian melalui zoom *meeting* kembali telah dilakukan komunikasi langsung dengan Dirjen Otonomi Daerah yang menunda pelantikan sampai status yang bersangkutan.

Persoalannya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita seorang warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 karena dia menikah dengan orang Indonesia disebutkan kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing akan kehilangan kewarganegaraannya meskipun demikian laki-laki warga negara Indonesia tersebut tetap dapat menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia kecuali memang pengakuan itu keinginan itu mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Nah, menurut informasi yang kami dengar beliau sudah mengajukan dengan siesion, dengan siesion kewarganegaraan Amerika tapi karena Covid katanya ini karena Covid belum diproses oleh. Dan sampai saat ini karena menurut PP Nomor 2 Tahun 2007 tata cara kehilangan pembatalan dan memperoleh kewarganegaraan harus berdasarkan permohonan melalui formal untuk dimohonkan pembatalan kewarganegaraan. Sampai saat ini Kementerian Hukum dan HAM belum memperoleh pengajuan permohonan ke pembatalan kewarganegaraan baik dari yang bersangkutan maupun lembaga resmi.

Nah untuk itu kami terus karena kalau kita kehilangan kalau kita membatalkan dan kemudian proses kehilangan kewarganegaraan Amerikanya terjadi juga maka dia menjadi *stateless*, Undang-Undang kita tidak mengenal *stateless*. Dulu ada kasus kita mengenai hal ini yaitu mengenai artian bertahap. Nah jadi sampai saat ini Bapak/Ibu sekalian, kami betul-betul sangat hati-hati sekali menilai, membahas bersama-sama dan selalu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, instansi terkait dalam pengambilan kebijakan mengenai hal ini.

Benar bahwa menurut Undang-Undang kita bahwa seorang warga negara asing tidak boleh menjadi pejabat publik, tapi pada saat yang sama itu seperti yang saya sampaikan karena pertimbangan-pertimbangan secara administratif dan lain-lain adanya pengajuan *renunciation* kewarganegaraan dan lain-lain yang sampai saat ini belum ada informasi yang jelas ini beberapa kendala. Namun demikian barangkali terbuka perdebatan-perdebatan mengenai hal ini.

Pak Ketua barangkali kami hanya menyerahkan saja kepada Anggota dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu aktual yang barangkali penting kita diskusikan karena materi semua yang dipertanyakan oleh Komisi III telah kami sampaikan dalam bentuk tiga format ya kepada Komisi III.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.
Selamat datang Abang Herman Herry.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia

Kita telah mendengarkan paparan Pak Menteri baik terkait evaluasi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga terkait prolegnas 2020, termasuk juga evaluasi dibidang keimigrasian dan pemasyarakatan bagaimana maraknya narkoba di permasyarakatan. Termasuk juga warga negara asing yang menjadi Bupati dan juga yang sangat menarik mungkin terkait dengan soal Demokrat.

Bapak-bapak rekan-rekan Anggota Komisi III,

Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan untuk mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Silakan untuk yang pertama kami dari bawah, kami persilakan Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan rapat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semangat pagi salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pak Menteri Hukum dan HAM,
Para pejabat utama beserta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual dalam rapat kerja pada pagi hari ini.

Terima kasih Pak Menteri, ada sejumlah hal yang ingin kami dalam kami pertanyakan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri dan jajaran untuk rapat kerja pada hari ini.

Yang pertama Pak Menteri, dua hari yang lalu saya membaca di media apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam tentang tim pemburu koruptor yang sampai sekarang meskipun sudah ada Inpresnya tetapi SK-nya belum terbentuk, karena ada satu Lembaga Hukum, KPK tidak setuju dengan pembentukan itu. Nah karena Pak Menko Polhukam bukan mitra kerja rutin dari Komisi III maka ini saya angkat pada rapat kerja dengan Pak Menteri Hukum dan HAM. Saya tidak bisa membayangkan sebuah otoritas, kewenangan, pekerjaan dari institusi, kementerian dan lembaga yang berada pada rumpun kekuasaan eksekutif tidak bisa jalan hanya karena satu institusinya tidak setuju. Nah, saya kira dari ruangan ini kami ingin agar pemerintah apabila serius ya segera dilaksanakan SK-nya dibentuk, mohon disampaikan kepada Presiden. Apalagi sedikit banyaknya ini juga terkait juga dengan peran Pak Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang

otoritas *central authority* dalam urusan memburu terpidana koruptor maupun yang lain-lain terkait dengan tentunya pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain.

Nah, sekaligus saya ingin menanyakan dalam catatan saya dalam sampai dengan tahun 2020 ini Indonesia telah melakukan perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan sejumlah negara, Swiss kemudian negara-negara Asean, Australia, Hongkong, RRC, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab dan Iran sampai saat ini sejauh manakah efektivitas perjanjian ini. Artinya apakah memberikan manfaat dalam proses penegakan hukum kita. Itu yang pertama Pak Menteri.

Yang kedua, ini terkait dengan legislasi tadi yang telah Pak Menteri sampaikan. Saya kira DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Pak Menteri sudah menyepakati bahwa dua RUU yang terkait dengan Komisi III RKUHP dan RUU Pemasarakatan menjadi RUU *carry over*. Nah, kami mohon Pak Menteri kalau bisa dan ini Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi III ini kita jadikan kesimpulan rapat bahwa RKUHP dan RUU Pemasarakatan ini kita dorong masuk dalam prolegnas prioritas 2021 itu ketika prolegnas prioritas 2021 ini kita revisi atau kita evaluasi biasanya dipertengahan tahun seperti yang telah disampaikan oleh Pak Menteri. Kenapa ini perlu, ya karena kalau kita kembali kepada peta jalan ini bukan peta jalan pendidikan nasional.

Peta jalan perbaikan sistem peradilan pidana terpadu kita, kita mestinya menyelesaikan RKUHP dan juga RUU Pas ini di tahun 2021 ini, sehingga di tahun 2022 kita harapannya bisa mulai melakukan revisi KUHP. Tentu dengan memasukan terlebih dahulu RKUHP itu dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Dalam pertemuan informal dengan Pak Menkumham masa sidang yang lalu kita sudah sepakat ini lebih baik di inisiasi oleh DPR RI, karena kan kalau di pemerintah ini maka pembicaraan inter Kementerian dan Lembaganya saja pasti akan panjang dan belum tentu sepakat sampai dengan pemerintahan atau DPR RI periode ini berakhir. Nah, saya melihat karena pada saat itu saya juga yang diminta oleh Pimpinan Komisi III untuk melihat. Kita bisa berangkat dari naskah akademik dan draf RKUHP yang dulu sudah pernah dibahas di DPR RI periode 2009 – 2014 kalau nggak salah, ini Pak Benny pasti hafal soal ini. Tentu, RKUHP soal Demokrat nanti bagiannya Pak Benny deh. Ini bisa dilihat dan tinggal tentu kita perbaiki disana sini tetapi kalau ini kita sepakati Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi III maka mungkin perlu dibentuk tim internal untuk menyiapkan naskah akademik dan RKUHP dengan menggunakan draf yang dulu dengan penyesuaian disana sini.

Dan yang terakhir Pak Menteri, izinkan ini aspirasi dapil sesuai dengan Undang-Undang MD3 ini terkait dengan lapas dapil saya yang menyedihkan itu Pak. Sepanjang tahun banjir Pak, kalau musim hujan banjir air hujan, kalau musim kering banjir rob. Saya sudah menikmati berbanjir-banjir dengan teman-teman jajaran Lembaga Pemasarakatan kelas IIA di Kota Pekalongan. Pada periode yang lalu terima kasih juga kepada Pak Menteri telah dianggarkan melalui sebetulnya rencananya anggaran tahun jamak dan kebetulan sudah juga disediakan tanahnya pada saat itu oleh Pak Bupati

Pekalongan. Ini mohon agar juga mendapat atensi nanti terutama setelah ada relaksasi anggaran tidak melulu *refocusing* dalam rangka Covid-19. Saya kira itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan dan mohon izin untuk menyampaikan aspirasi dapil ini langsung kepada Pak Menteri.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Arsul.

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi PAN atau yang mengikuti secara virtual Pak Sudding, Pak Dek Gam ada? Baik, kami lewati.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKS, yang virtual ada yang ikut? Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat Bang Benny atau Bang Santoso *monggo*.

F-PD (H. SANTOSO, S.H.):

Yang junior dulu yang tanya ini katanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati ,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Yang pertama saya ingin sampaikan kita belum nanya dulu soal KLB Deli Serdang karena kita yakin Pak Menteri akan objektif menilai atas apa yang terjadi di Demokrat saat ini. Yang berikutnya Pak Menteri saya menyoroti tentang masalah narkoba yang ada dilapas, karena ini berkaitan juga tentang perilaku para pengguna dan bandar setelah mereka masuk lapas itu nyamannya luar biasa dibandingkan saat mereka di luar. Untuk itulah saya ingin mengkritisi ini Pak soal para bandar narkoba dari data yang Bapak sampaikan ini berjumlah 643 orang Pak yang dipemindahan ya sampai di Nusakambangan gitu dan dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap 643 orang ini.

Saya menilainya belum maksimal Pak Menteri. Disamping setiap lapas *over crowded* terhadap para tahanan narkoba itu bandar-bandar juga lebih leluasa bergerak pada saat dia di dalam. Untuk itulah jumlah yang Bapak sajikan ini memang *real* ya tapi menurut saya belum maksimal. Dalam forum ini saya berharap di tahun 2021 nanti lebih maksimal dilakukan. Kenapa sudah tidak bukan rahasia umum lagi Pak Menteri bahwa mereka-mereka para bandar-bandar setelah ditangkap mereka lebih nyaman dan bahkan lebih leluasa untuk melakukan peredarannya mengendalikan di luar dari lapas.

Saya tinggal di Sunter Agung Pak Kecamatan Tanjung Priok dimana banyak bandar disitu Pak. Ada kawan saya itu waktu jadi bandar kecil-kecilan sebelum ketangkap rumahnya ngontrak Pak tapi sekarang punya rumah pada saat dia ada di dalam. Ini jelas bukti nyata mesti ada tindakan yang *extraordinary* oleh jajaran Pak Menteri dan ironisnya lagi ini kejadian di Jakarta ini Pak, apakah objektif atau tidak tapi saya melihatnya dalam sisi persoalan yang sangat akut soal penanganan masalah napi narkoba di DKI Jakarta. Saya tidak begitu kenal dengan Kanwil yang sudah diganti oleh Pak Menteri DKI Jakarta katanya Kanwilnya baru sekarang Pak ya. Kemarin pada saat kita rapat kunjungan kerja ke lapas Cipinang bersama Kanwil itu ada yang demo Pak.

Demonya menunjukkan bahwa Kanwilnya banyak melakukan kesalahan dalam upaya penanganan di lapas Cipinang, tapi yang sesungguhnya adalah bahwa Kanwil itu bertindak tegas terhadap siapa, terhadap napi-napi yang jelas melakukan peredaran narkoba di dalam lapas yang mengendalikan di luar lapas juga. Saat ini dipindah Pak jadi kami menganggapnya ya ada konspirasi juga di elit di level jajaran Bapak ini untuk memindahkan orang-orang yang tidak sejalan dengan bandar-bandar narkoba itu. Dan ini sungguh ironi Pak di satu sisi kita menganggap bahwa narkoba ini suatu bentuk musuh yang paling besar di republik ini menghancurkan generasi muda tapi mereka difasilitasi. Jadi mohon dapat atensi dari Pak Menteri supaya hal ini tidak terjadi lagi Pak. Beliau orang baik melakukan tindakan gitu tapi karena ada demo-demo, ada protes-protes yang sesungguhnya menurut informasi yang kami dapat dilakukan oleh para bandar narkoba akhirnya yang bersangkutan dipindahkan gitu. Ini dalam sisi pengamatan kami ya, mungkin Pak Menteri dan jajaran punya penilaian objektifitas yang lain tapi kita melihatnya disitu gitu Pak.

Kemudian yang berikutnya juga soal penempatan pihak Kementerian Hukum dan HAM terhadap orang-orang yang ada di lapas Pak. Supaya *rolling* itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan mulai dari ASN sampai mau pensiun dia adanya di lapas terus. Kenapa, karena memang disitu sekarang menjadi tempat mapan bagi para ASN di tempat Bapak yang bertugas di lapas. Ini harus diawasi Pak, mesti di *rolling* Pak. Jadi sekali lagi harus dilakukan pengetatan karena infonya di level eselon Bapak itu juga bersaing untuk menempatkan orang. Si A perilakunya tidak baik begitu mau dipindah di *back up* oleh anak buah Bapak yang punya posisi sehingga dia bertahan lagi, hal ini harus diubah.

KETUA RAPAT:

Bang Santoso singkat ya, waktu.

F-PD (H. SANTOSO, S.H.):

Iya satu lagi.

Ada 6 (enam) mantan petugas LP Bapak yang ditahan maksudnya yang sudah dibebaskan tugaskan dan dipidanakan Pak. Menurut saya juga masih kurang harus ada tindakan tegas lagi gitu loh, jadi kalau yang salah ya jangan

dilindungi harus diberantas, karena ini sudah saya anggap ini mafia Pak, mafia ASN Kemenkumham di lapas-lapas. Saya kira itu.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB.

F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, Pak Setjen selamat ini Pak Setjen Pak Andap,

Pertama kami apresiasi kinerja Kementerian Kumham ini di 2020 sebetulnya sudah sangat baik Pak Menteri. Kalau lihat disini Kumham ini sudah meningkat lah baik indeks pelayanan publik, indeks integritas sistem *outforing* dan evaluasi, serta indikator kinerja ini sudah mulai baik dan terus meningkat, tapi ada beberapa hal sebetulnya bahan yang dikasih Pak Menteri ini sudah cukup lengkap bagi kami sebetulnya untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama adalah sebetulnya ini masalah klasik, itu *over* kapasitas lapas Pak Menteri. Ini banyak banget lapas yang memang dari hasil kunjungan kita itu di kunjungan kerja itu *over* kapasitas. Salah satunya mungkin contohnya Kelas II Salemba. Jumlah tahanan 1.775 orang kapasitasnya hanya 572 orang, ini *over* kapasitasnya 210%. Nah, ini kan kondisi sekarang pandemi Covid belum saya lihat disini ada data di lapas Salemba saja sepanjang Agustus 37 orang terkena HIV, 13 orang terkena TBC dan 525 orang terjangkit penyakit lainnya ini karena *over* kapasitas ini. Nah, ini tadi sebetulnya Pak Arsul sudah bagus itu kalau perlu dorong KUHP dan Undang-Undang PAS itu Pak Menteri. Nah, ini harus ada solusi di 2021 kira-kira seperti apa Kumham untuk mengatasi *over* kapasitas. Karena ini nggak bisa dibiarkan terus apalagi terkait narkoba.

Tadi Pak Santoso sudah sedikit menjabarkan sebetulnya narkoba ini memang sekarang lapas ini menjadi tempat yang cukup nyaman buat para pengedar. Kita lihat kemarin data saat kita kunjungan ke Riau 500 tahanan di sana terlibat peredaran narkoba. Dari tahanan ini Pak Menteri gambarannya. Terus akhir tahun 2020 Polda Metro misalnya mengatakan bahwa setelah melakukan penangkapan ternyata di LP Cipinang sebagai pengendali barang tersebut. Jadi ternyata di Jabar pun sama di Banten pun sama. Jadi di Lapas ini ternyata banyak pengedar-pengedar yang masih mengendalikan. Nah

yang menjadi persoalan, tadi Pak Santoso juga jelaskan, sebetulnya bagaimana pengawasan di dalam lapas sendiri bagi para pengedar tersebut.

Pak Menteri kan sudah kirim bandar-bandar gede ke Nusakambangan tapi yang kecil-kecil ini loh juga masih mengedarkan narkoba malah dari dalam mengarahkannya. Nah ini contohnya misalnya yang kemarin di Tangerang itu bandar narkoba yang lari terus akhirnya ditemukan meninggal. Nah, sekarang bagaimana petugas yang diduga turut serta membantu? Nah hukumannya seperti apa. Nah ini juga butuh kejelasan Pak Menteri karena kita harus tegas-tegasan soal narkoba ini.

Yang kedua saya ini ada data terkait persoalan buronan interpol Kebangsaan Rusia si Andrew Ayer yang ada di imigrasi Bali kabur lagi. Nah ini kan sering sekali ini kecolongan ini bahwa adanya buronan ini yang sebetulnya saat ditangani kok bisa lepas gitu loh Pak Menteri, nah ini juga harus ada solusi baiknya. Terima kasih mungkin itu saja Pimpinan.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit tharieq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Nasdem.

F-P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.):

Baik terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Shalom
Om swastiastu
Namo Buddhaya.
Salam kebajikan.*

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajaran,

Pertama-tama saya mewakili Fraksi Partai Nasdem secara khusus mengapresiasi apa yang sudah disampaikan bahkan dalam kinerja yang sudah berjalan sepanjang tahun 2020. Hanya ada beberapa catatan penting terutama kebetulan saya dalam masa reses kemarin secara khusus menyerap beberapa aspirasi dan pada kesempatan ini nanti izinkan saya menyampaikan secara langsung kepada Bapak Menteri apa yang menjadi permasalahan di lapangan secara khusus di Kalimantan Tengah.

Yang saya cermati adalah seperti yang disampaikan kawan-kawan terdahulu dengan *over capacity* yang ada dan ternyata sebagian besar kebetulan saya juga mungkin ada kawan-kawan yang juga berangkat ke Lampung kemarin Pak Menteri di persoalan warga binaan yang ada di Lampung sana, satu luar biasa karena disana banyak juga warga binaan yang

dibina karena teroris dan sudah menyatakan untuk cinta kepada tanah air, cinta kepada NKRI, cinta kepada Pancasila ini luar biasa. Jadi para Kalapas yang ada di Bandar Lampung saya mengapresiasi.

Kemudian ternyata ada kasus yang sangat menarik warga binaan yang ada di dalam mampu mengendalikan peredaran narkoba yaitu 450 kg ganja dan waktu itu saya juga sudah menyampaikan hal tersebut dan memang akan ditindak lanjuti. Nah hal seperti ini mungkin menjadi perhatian khusus kepada para petugas yang ada di lapas-lapas bagaimana mereka tidak hanya berpikir untuk barangkali hal-hal yang sesaat tetapi memikirkan bahwa ternyata peredaran narkoba itu justru sangat kencang di dalam lapas dan rutan. Dan secara khusus terakhir Pak Menteri bahwa di Kalimantan Tengah ada kasus di Kabupaten Sukamara itu ada lapas yang sudah terbangun tetapi karena ada permasalahan hukum kontraktor yang mengerjakan sedang dalam masalah hukum sehingga itu tidak berfungsi, karena temboknya sepanjang 4 meter itu ada roboh.

Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan mohon izin beberapa aspirasi secara khusus karena saya seorang perempuan saya keliling Pak Menteri ke lapas kelas II Palangkaraya lapas perempuan, lapas anak. Fasilitas sudah sangat bagus hanya secara khusus di lapas perempuan disana ada keluarga binaan sebanyak 135 kalau tidak salah, sedangkan bloknnya cuma satu. Sangat kurang fasilitasnya dan kemarin saya juga mencoba mengkomunikasikan dengan Pemerintah Daerah setempat supaya hal-hal yang bisa ditanggulangi bersama itu bisa dijalankan tetapi saya bermohon barangkali kebutuhannya masih tiga blok paling tidak satu blok untuk untuk bisa diperhatikan.

Saya kira itu saja beberapa hal khusus yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi dengan program kerja yang ada dan saya berharap tahun 2021 lebih menyentuh lagi untuk ketika warga binaan keluar mereka siap menjadi orang yang berguna juga bagi masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra silakan.

F-PARTAI GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Anggota Komisi III yang kami muliakan,
Bapak Menteri dan staf yang kami hormati,

Pada Kementerian kinerja Kementerian tahun 2020 sudah cukup bagus Pak walaupun disana ada keterbatasan-keterbatasan yaitu apalagi ada pandemi Covid. Kemudian di tahun 2021 ini Bapak jadikan momen sebagai momen perubahan kalau nggak salah, dimana dari 11 program Bapak manfaatkan jadi 4 (empat) program untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM:

1. Program pembentukan regulasi
2. Program penegakan dan pelayanan hukum
3. Program pemajuan HAM
4. Program dukungan manajemen

Kemudian Pak kami mencatat ada dua fungsi juga yang ada di Kementerian Bapak yaitu fungsi pelaksanaan pembinaan hukum nasional, juga fungsi penyelenggaraan dan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum Pak. Kami kemarin di Baleg itu menemukan ada amanah Undang-Undang yang belum dilaksanakan sampai tahun ini Pak yaitu amanah Undang-Undang soal Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan Pak. Dimana disana diamanahkan bahwa pemerintah harus segera membentuk Badan Pangan Nasional, Undang-Undang itu diundangkan tahun 2012.

Dalam amanah itu diamanahkan tiga tahun setelah Undang-Undang itu dibentuk harus dibentuk namanya BPN tersebut, tapi hari ini tahun 2021 BPN ini belum juga dibentuk Pak. Padahal kita tahu sendiri bahwa pangan ini juga masuk dalam kebutuhan hak asasi manusia dan kita sendiri juga tahu bahwa komoditi pangan ini sangat puas ya Pak ya kemudian juga ditangani oleh beberapa Menteri termasuk Menteri Pertanian, kemudian Menteri Perdagangan.

Nah kita juga paham bahwa selama ini komoditi pangan ini juga banyak masalah, mau lebaran terutama Pak, mau tahun baru, kemudian nanti musim panen ini ada isu import beras nah ini kan juga jadi masalah Pak. Jadi mohon kami minta bantuan pada Pak Menteri sebagai penyelenggara dan pelaksana Undang-Undang ini Pak untuk dibantu disampaikan ke pemerintah perihal masalah Badan Pangan Nasional ini Pak.

Yang kedua Pak kami juga melihat bahwa di Kementerian Bapak itu ada fungsi pelaksanaan pembinaan hukum nasional juga, juga fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Hukum dan HAM dengan baik. Jadi kami masih belum melihat fungsi pelaksanaan, penelitian dan pengembangan dibidang hukum ini karena masih belum tajam di Kementerian Bapak itu. Kenapa Pak banyaknya masalah-masalah isu-isu nasional yang sampai saat ini jadi perdebatan di masyarakat. Contoh yang tadi disinggung masalah isu-isu parpol, kemudian kemarin Undang-Undang ITE nah ini kan ditempat Bapak ada fungsi pelaksanaan, penelitian dan pengembangan dibidang Hukum dan HAM.

Belum lagi kemarin itu juga ada isu masalah HAM, ini yang kami inginkan Pak sesuai nama Kementerian Bapak bahwa Kementerian Hukum dan HAM kami ingin Bapak yang tampil disana gitu sesuai kajian sesuai

analisa Bapak. Apa yang disebut di dalam isu-isu tersebut yang benar apa jangan kemudian Pakar ini ngomong itu, Pakar ini ngomong ini sehingga rakyat ini bingung Pak. Jadi sementara dari kami Pak Menteri dua hal itu saja dulu yaitu masalah Badan Pangan Nasional yang pertama, yang kedua masalah mohon di efektivitaskan lagi fungsi pelaksanaan, penelitian, pengembangan dibidang Hukum dan HAM di Kementerian Bapak. Sementara itu Pak.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar.

F-PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita sekalian.

Salam sehat untuk semuanya.

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi III,
Yang saya hormati saya banggakan Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,

Sama halnya seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami sebelumnya. Bahwa saya ingin mengapresiasi dulu saya dan mewakili Fraksi Partai Golkar ingin mengapresiasi kinerja Hukum dan HAM tahun 2020, salah satunya yaitu terkait pembentukan 49 PP berkaitan dengan Undang-Undang Ciptaker. Nah terkait *back up* dari Undang-Undang Ciptaker ini tentu tidak bisa berdiri sendiri di pusat saja Pak. Bahwa kita memerlukan peraturan daerah yang bisa *membbackup* keberadaan Undang-Undang Ciptaker tersebut yaitu di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. Nah terkait pembinaan Ditjen Perundang-Undangan terhadap Kanwil-kanwil di provinsi terkait dengan pembentukan Perda ini sudah sejauh mana Pak, karena kekhawatiran kami kalau tidak di dampingi, di bina khawatir pembuatan Perda baik itu ditingkat provinsi ataupun kabupaten kota ini bisa dibatalkan oleh Kemendagri karena berdasarkan pengalaman banyak sekali perda-perda yang sudah dibuat menghabiskan anggaran yang banyak kemudian dibatalkan oleh Kemendagri. Oleh karena itu kami meminta Ditjen Perundang-Undangan untuk terus membina Kanwil-kanwil di Provinsi dan Kabupaten Kota.

Kemudian yang kedua Pak Menteri, kita tahu bahwa varian baru Covid-19 yaitu Corona 117 ini sudah masuk di Indonesia. Tercatat sudah ada 5 provinsi yang terpapar dari varian baru Covid 117 ini dan data yang kami dapatkan bahwa di Maret 2021 kemarin ada dua warga dari Kabupaten

Karawang yang berpulang dari Qatar yang membawa varian baru Covid 117 ini. Nah yang ingin saya tanyakan terkait pengawasan migrasinya bagaimana kantor imigrasi perlintasan dalam mendeteksi masuknya varian-varian baru Covid, karena kita tahu Covid ini bermutasi mungkin sekarang 117 kedepan *wallahualam* kita nggak tahu seperti apa. Dan bagaimana juga kerja sama dengan maskapai penerbangan, dengan karantina Kementerian Kesehatan agar ya tadi tidak banyak warga negara kita yang berpulang dari luar negeri kemudian membawa varian baru Covid-covid yang lain.

Kemudian yang ketiga Pak, ini berkaitan juga dengan aspirasi dari dapil kami kebetulan saya dapil saya di Banten I Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, di sana di dua Kabupaten tersebut belum ada kantor imigrasi. Sedangkan kita tahu bahwa beberapa tahun kebelakang ada kasus semen merah putih dimana tenaga kerja asing di wilayah Banten Selatan itu cukup tinggi sehingga keberadaan TKA disana mungkin tidak terawasi dengan baik dan maksimal dan yang kedua perlu saya sampaikan bahwa diakhir tahun 2021 ini Insya Allah Tol Serang-Panimbang dan ini akan berimbas terhadap investasi yang akan masuk ke wilayah Banten Selatan. Oleh karena itu, harapan kami Pak Menteri agar didorong Kanwil Provinsi Banten untuk bisa membuat imigrasi definitif disalah satu baik itu mau di Kabupaten Lebak atau pun di Kabupaten Pandeglang demi tadi untuk pengawasan tenaga asing atau pun pembuatan *passport* bagi masyarakat yang tadi Pak Menteri sampaikan akan berangkat umroh ataupun berangkat haji.

Dan yang ketiga, Pak Menteri ada berita isu-isu faktual di bulan Februari 2021 yang lalu bahwa Densus 88 telah menangkap 22 orang terduga teroris dari jaringan jamaah islamiah di Jawa Timur. Sedangkan menurut Polri jaringan JI tersebut pengikut dan simpatisannya sebanyak kurang lebih 6.000 jarang. Terbayang kalau Densus, Polri menangkap 6.000 teroris terduga teroris kemudian akan disimpan dimana, akan seperti apa pembinaannya, seperti apa lapas yang nanti yang akan dipersiapkan oleh Dirjen PAS bersama-sama dengan Bapasnya. Nah, ini juga mungkin harus menjadi perhatian karena kita berharap teroris-teroris di Republik Indonesia yang kita cintai ini dibelenggu sampai ke akar-akarnya. Terima kasih sekian dari saya.

Wabillahi taufik hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Mungkin ada tambahan dari Pak Andi Rio silakan, singkat ya.

F-PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn):

Terima kasih Pimpinan yang bijaksana.
Satu menit saja Pimpinan.

Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati

Ini hanya sekedar masukan Pak. Ini aspirasi dari calon Notaris maupun seluruh Indonesia. Jadi mereka mempertanyakan dari kapan katanya mereka akan diberikan kesempatan untuk menjadi Notaris, karena mereka ini sudah menunggu-menunggu sampai sekarang pihak Kementerian belum membuka pembukaan tentang Notaris tersebut. Begitu juga dengan calon Notaris yang akan pindah tempat. Jadi sekarang ini menunggu kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Yang kedua adalah semua disini Pak Menteri Anggota Dewan yang terhormat ini semua keluhannya adalah tentang narkoba atau pun peredaran narkoba di dalam lapas. Hampir semua Anggota Dewan terhormat ini mengatakan hal yang sama. Pertanyaan saya adalah hal ini sudah lama terjadi dan mungkin semenjak Kementerian ini berdiri. Saya ingin mengatakan tolong coba Pak Menteri kira-kira cara apa atau terobosan apa yang Bapak lakukan beserta jajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira begitu saja Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik yang terakhir Fraksi PDI silakan.

F-PDI.P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Atas izin Pak Ketua Pak Herman Hery tentunya.

Pertama-tama Pak Menteri terima kasih atas paparannya. Terlihat kerja hebat, kerja luar biasa dan kerja pelayanan terkait dengan berbagai kepentingan. Kementerian Hukum dan HAM ini luar biasa Pak melayani kepentingan pemerintah *usernya* Pak Jokowi. Melayani kepentingan negara disamping utamanya adalah pelayanan publik kepentingan rakyat. Kami apresiasi evaluasi kinerja 2020 Pak Menteri, disitu Pak Menteri tadi nggak nyebut adanya penghargaan dari KSN berkaitan dengan merit sistem jadi kalau dikatakan tadi ada masuk-masuk penempatan-penempatan yang katanya bermasalah ini KSN sudah menilai. Kemudian juga ada predikat A dari BKN terkait juga penilaian kompetensi.

Saya pikir ini sudah bukannya membantah mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan di forum ini. Saya berpikir Kementerian Hukum dan HAM ini nyaris tanpa cela Pimpinan. Kan selama ini yang kita bahas itu adalah masalah klasik. Masalah-masalah turunan yang sebelum-sebelumnya juga sudah dihadirkan. Saya ucapkan selamat kepada para yang baru-baru ini ada Pak Setjen, Pak Setjennya memang pekerja Pak makanya saya pikir memberikan penguatan ini pada Kementerian Hukum dan HAM. Ditengah prestasi yang begitu bagusnya saya juga sebenarnya bingung kok ada Pak Wamen tapi ya saya pikir Pak Wamennya tokoh hebat juga saya pikir

ditugaskan untuk memberikan penguatan kepada Pak Bapak Kementerian Hukum dan HAM.

Pak Wamen ini adalah idola saya tapi Pak Wamen, Pak Wamen harus satu dengan Menterinya Pak. Dulu saya juga di politik itu belajar bagaimana tegak lurus sama Pimpinan. Kemudian kami juga memang kemarin waktu awal-awal sama Pak. Kita waktu awal-awal jadi DPR RI juga banyak kesalahan kalau boleh Pak *statement* yang kemarin itu diperbaiki Pak, karena kita begitu makan APBN Pak detik itu juga kemungkinan kita dibilang koruptor itu ada Pak. Ditambah lagi kalau dibilang dihukum mati itu bagi kita sakit sekali. Saya yakin keluarga-keluarga kita yang di dalam sana yang kena masalah hukum juga tidak punya keinginan untuk melakukan seperti itu ditengah pandemi Covid-19. Saya sangat mendukung Pak Wamen, Pak Wamen potensial mudah-mudahan semakin hari semakin bagus dan akan menjadi tokoh besar dikemudian hari.

Berikutnya kami juga apresiasi Pak Menteri, pelayanan publik diseluruh sektor Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada lapas dan juga jalannya persidangan ditengah pandemi Covid-19. Saya pikir antara beberapa penegak hukum Hukum dan HAM lah yang paling *prepare*, yang paling mempersiapkan diri untuk menyediakan persidangan yang begitu bagus. Nyaris persidangan itu tidak ada masalah di lapas Pak. Ini makanya apresiasi Pak Dirjen jalannya proses persidangan di lapas itu, mungkin ada kendala di Kejaksaannya ada disebelah mananya tapi untuk di lapas kita dapatkan informasi yang begitu hebat. Berikutnya mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kami terima kasih apresiasi Pak Dirjen PP tapi kami juga ada tanggung jawab Pak bagaimana menghasilkan kebijakan dan peraturan-peraturan yang selaras dengan yang namanya Omnibuslaw, dengan yang namanya pemantauan peraturan perundang-undangan. Tadi dikatakan masalah Undang-Undang Pangan sama teman dari Gerindra tadi. Kami juga ingin Pak memang harus dibuat suatu *task force* atau memang ada tim betul yang memang melihat bagaimana pengharmonisasian undang-undang, yang mana mencerdaskan dan menterjemahkan. Undang-Undang apa saja di Republik ini yang sudah dijalankan paripurna. Saya termasuk orang yang beranggapan undang-undang di Republik ini jalannya hanya sebagian yang berkaitan dengan keluarnya uang APBN.

Di luar itu undang-undangnya tidak jalan Pak. Nah, ini akan menjadi bagian pengayaan apabila Kumham bisa berperan untuk itu. Berapa banyak badan yang diatribusikan oleh Undang-Undang yang belum terbentuk. Kita punya yang namanya Undang-Undang Pangan namanya Lembaga Pangan Nasional itu sudah 2012 maksimal 2015 terbentuk sampai sekarang belum terbentuk Pak. Nah, yang seperti itu harus ada notifikasi dari Kumham kepada Pak Pemerintah Pak Jokowi maupun teman-teman di Baleg agar kita bisa saling memberikan penguatan untuk perbaikan.

Berikutnya mengenai pelibatan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Saya pikir yang dilakukan

oleh Baleg DPR RI itu sudah luar biasa tinggal dilakukan pengayaan dan penguatan oleh Pak Dirjen PP Pak. Tapi kita juga harus katakan kepada publik Pak semua Undang-Undang dilakukan dengan sangat terbuka dan transparan tapi kita harus jelaskan rakyat juga harus belajar *fair* jangan keinginannya tidak tercapai dibidang Undang-Undangnya tidak transparan dan tidak melibatkan mereka. Kami juga ingin suaranya tidak hanya dari DPR RI saja Pak kalau bisa pemerintah juga menyuarakan itu. Kita nggak bisa *mengentertain* karena regulasi itu pastinya akan merugikan beririsan dengan kepentingan orang ada yang *unhappy* disitu.

Berikut mengenai lapas saya ada Pak Andi Rio tadi mengatakan semuanya mengatakan saya termasuk orang yang tidak percaya lapas sumber permasalahan dan sumber peredaran narkoba. Orang masuknya narkoba itu tidak dihasilkan di lapas kok dari luar, kok dikatakan lapas petugas lapas jadi sarangnya narkoba, sarangnya narkoba itu adalah di luar. Kejahatan lapas apabila ada pembiaran, apabila ada permufakatan jahat, di luar itu lapas nggak bisa disalahin Pak. Ada Instansi Lembaga yang lebih berwenang yang harus bertanggung jawab untuk itu. Nah mudah-mudahan kita juga satu paradigma, satu pandangan sehingga nanti berpikirnya lebih sehat lagi Pak. Kita harus bisa mendiagnosa masalah sehingga nanti obat-obatnya juga yang sehat juga Pak. Selama kita katakan lapas sarang narkoba, petugas lapas begini, petugas lapas begini ya nggak bakalan ketemu sumber permasalahan *wong* narkobanya dari luar. Ini mudah-mudahan kita bisa menjadikan pencermatan disini.

Pak Menteri saya juga minta tolong, Pak Menteri punya Permenkumham dulu ya yang sangat kita apresiasi terobosan Pak Dirjen, tapi sekarang ini masih ada 117.000 Pak kapasitas hunian yang kurang walaupun sudah ada Permenkumham itu Pak artinya mungkin harus ada terobosan lagi Pak Menteri. Misalnya untuk narkoba yang bandar narkoba hukum mati, tembak nggak usah dikasih makan kasih racun misalnya, tapi yang pengedar yang masih yang cuma nol koma nol koma yang korban itu juga harus ada *treatment* khusus sehingga kita tidak direpotkan dengan jumlah tingkat hunian yang begitu. Artinya apa, mungkin ada yang namanya semacam intel Pak Wamen yang bisa dia bisa melihat oh ini cuma sekian, oh ini korban, ini apa yang bisa dilakukan keadilan yang restorative dan betul-betul substantif dihadirkan karena 70% itu kan hunian itu narkoba semua.

Berikutnya mengenai efektivitas Makumjapol. Ini kami juga minta tolong Pak Menteri. Pertanyaannya apakah efektif saya lebih efektif apabila nanti forum ini ditarik ke rapat konsultasi di DPR RI Pak, ada Mahkamah Agungnya, ada Pak Kapolri, ada Pak Jaksa Agung sehingga apa yang disampaikan dan yang *uneg-uneg* semua ini termasuk teman-teman di Kumham masalah *over crowding*, masalah putusannya suka terlambat, masalah Jaksa tidak mengeksekusi dan sebagainya bisa diselesaikan melalui forum politik disini Pak. Dari pada Bapak kan namanya setara semua nggak mungkin saling *neken* nggak mungkin saling merintah. Saya pikir perlu dihadirkan dan menjadi bagian dari kesimpulan rapat Pak.

Mungkin yang terakhir Pak ini ada kaitannya sama perlindungan haki. Haki ini kan ciri khas negara hukum modern Pak Menteri. Pak Jokowi percuma mau narik investor saya yakin investor nggak bakalan datang Pak. Kenapa Pak, saya kasih contoh gini Pak Pak Setjen juga sama Pak Dirjen Haki. Ini misalnya ada orang produk cocacola ada cocacola palsunya Pak kita ingetin eh kamu palsu kamu jangan buat palsu lagi barang-barangmu ditarik ya. Apa yang terjadi di republik ini Pak, yang palsunya ngegugat yang palsunya dimenangkan Pak, kita pindahin lagi lah kesini. Ini kejadian dan banyak hal Pak Dirjen kami mohon terkait dengan hal yang seperti itu Pak Dirjen bantu Pak.

Polisinya sudah mau P21 tapi main Pak sama kekuatan, kekuatan mungkin diatas kekuatan Polisi Pak, sehingga yang tadinya sudah mau P21 diperadilan kan kalah Polisi Pak dan Polisi nggak ngelawan lagi. Hukum kita Pak begini nah kami mohon Pak Dirjen Haki nanti dibantu Pak yang begitu. Begitu juga Dirjen Ahu Pak, dulu zamannya saya masih sekolah kita kenal yang namanya *hostile takeover* sekarang lebih dari *hostile takeover Pak*. Tiba-tiba kita punya perusahaan nama kita lenyap jadi pemegang saham Pak, nama kita jadi Direktur lenyap, tiba-tiba kita menggugat kitanya dipenjarain masuk penjara Pak. Nah ini kami mohon sekali agar bisa diberikan penguatan saya pikir peran-peran pelayanan publik dibidang AHU dan dbidang Haki ini bisa menjadi penguatan bagi kehadiran negara ditengah masyarakat dalam konteks keadilan.

Terakhir sekali mengenai RKUHP Pak Menteri sama RUU Pas. Saya masih melihat dipaparan Pak Menteri mudah-mudahan kita harusnya satu paham dan satu pandangan. Disini dikatakan terdapat 14 subtransi RKUHP yang berkembang mendapatkan perhatian khusus, DPR RI tidak melihat itu Pak DPR RI melihatnya ini sudah *final* karena kemarin ada permasalahan yang dimainkan oleh sekelompok elit tertentu disaat rakyat masih terbutakan sehingga gagal kita ini semua. Jadi kami mohon kita jangan gentar Pak dan kalau boleh nanti sosialisasinya kebetulan kami-kami ini masih terlibat di KUHP kemarin masih hafal sedikit Pak Wamen kalau bisa dilibatkan.

Misalnya kalau Bapak lagi kan katanya hadir ke Medan kita dilibatkan semua ini punya jejaring Pak sampai ke desa-desa Pak kalau Partai Politik Pak orang-orang DPR RI ini Pak jadi pastinya lebih efektif dari pada hanya sekedar mengundang beberapa gelintir orang. Bapak bawa Anggota satu DPR RI satu kita mewakili mungkin 80.000 atau 100.000 di daerah. Mudah-mudahan bisa menjadikan kesepahaman pada forum ini. Terima kasih Pak Menteri kita apresiasi atas kerja-kerja Kementerian Kumham di 2020.

KETUA RAPAT:

Baik sebelum Pak Menteri menyampaikan jawaban waktu kita perpanjang 30 menit lagi Pak Menteri.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak Menteri.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Ketua/Pimpinan/para Anggota yang telah menyampaikan pertama yang menyampaikan apresiasi, berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Dari Pak Arsul kami akan komunikasikan nanti Pak soal tim pemburu koruptor sampaikan kepada Pak Menko, Pak Menko yang menyampaikan kepada Bapak Presiden. Saya kira memang dari Jaksa Agung kan sudah sangat berkeinginan untuk melakukan itu dan kita lihat belakangan ini memang Jaksa Agung sangat kencang dalam soal memburu beberapa kasus-kasus yang besar-besar yang untuk itu barangkali kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Tentang *central authority* tentunya Bapak/Ibu sangat bermanfaat pengalaman kita baik mereka yang meminta kepada kita untuk bantuan mencari orang-orang warga negara mereka yang melarikan diri ke Indonesia yang melakukan tindak pidana atau orang lain yang melakukan tindak pidana suatu negara untuk dikembalikan ke Indonesia ada beberapa kasus yang telah kita bantu untuk itu. Nah soal *central authority* tentu merupakan tugas dan tanggung jawab kita tetapi permintaan itu datang dari Aparat Penghak Hukum tentunya ke kita untuk melaksanakan tugas sebagai CA. Dan saya kira tidak akan terkendala kalau kita kaitkan dengan walaupun ada atau pun tidak ada tim pemburu koruptor kalau apgakumnya meminta kepada kita pasti kita lakukan sebagai *central authority* atau negara lain sendiri pun meminta kepada kita tentu kita lakukan.

Tadi Pak Arsul sudah meng *quote* beberapa negara termasuk Swiss, Iran, UEA, Vietnam dan lain-lain. Nah soal Swiss kita baru saja kira berapa tahun lalu kita mengesahkan perjanjian MLA kita dengan Swiss. Seharusnya awal Februari yang lalu Swiss juga meratifikasi tapi oleh karena Covid sampai data terakhir yang kami peroleh Swiss belum meratifikasi tapi kami terus melakukan kontak dengan Duta Besar disini juga dengan pemerintah disana, karena pada waktu kunjungan saya ke Geneve pada waktu yang lalu menghadiri sidang waiko kami sebenarnya sangat berkeinginan supaya saat itu kita langsung *exchange* ratifikasi yang antara yang sudah kita lakukan dengan mereka lakukan tetapi pada saat itu memang Swiss masih parlemennya belum bersidang karena Covid pada waktu itu.

Tapi kami percaya bahwa ini terus kita komunikasikan kalau pada saat nanti Swiss sudah meratifikasinya kita akan mensahkannya perjanjian itu disahkan parlemen kita akan bertukaran dan ini barang kali akan *follow up*-nya akan kita lakukan sesegera mungkin. Terima kasih, sepakat Pak KUHP PAS tadi juga disampaikan oleh Pak Arteria dan beberapa teman tentang KUHP dan PAS. Nanti pada pertengahan evaluasi kita evaluasi bersama untuk kita bahas dan barangkali benar nanti kalau ada sosialisasi tidak ada salahnya diberitahukan ke Komisi III kalau ada yang menugaskan untuk ikut bersama-sama dengan tim KUHP untuk ikut bersama-sama dengan kita.

F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Interupsi Pimpinan interupsi Pimpinan.

Pak Menteri interupsi sebentar Pak Menteri terkait dengan RUU KUHP ini. Jadi selain di sosialisasikan apakah tidak perlu sebelum kita memulai itu kita lakukan dulu pembicaraan dengan semua para pihak termasuk dengan para praktisi-praktisi hukum. Karena masih ada beberapa akademisi yang mempersoalkan tentang RUU KUHP ini, khususnya terkait dengan *lex specialis derogat legi generali* jadi kaitannya dengan Undang-Undang *Lex Specialis* termasuk ITE, termasuk korupsi dan lain-lain. Dan yang 14 itu saya paham Pak Menteri masukan 14.

Memang ini kan banyak undang-undang *lex specialis* disitu. Jadi hal ini memang perlu dibicarakan sekali lagi. Saya sependapat dengan Pak Menteri mungkin apa yang disampaikan tadi sahabat saya dari PDIP yang menyatakan sudah ini sudah *firm* seperti itu tapi kenyataannya memang masih banyak polemik ditengah masyarakat. Jadi sekali lagi ini memang harus perlu dibicarakan agar pada saat pembahasan tidak ada lagi polemik-polemik itu Pak Menteri terkait dengan *lex specialis* itu. Itu

Terima kasih Pimpinan.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Jadi memang sejak awal tidak hanya diluar Pak. Diantara Kementerian Lembaga Pemerintah saja pada waktu itu Kejaksaan, KPK dan lain-lain itu mempersoalkan. Kita kan sudah sangat jelas bahwa KUHP pidana ini kan masternya, jadi sebagai *lex generalis*. Jadi kalau ada memang Undang-Undang yang khusus ya memang pastilah menyampingkan ketentuan-ketentuan umum, tapi yaudah itu perlu dijelaskan benar, perlu dijelaskan secara khusus kepada para pihak termasuk pada waktu itu Komnas HAM ngotot, KPK, bahkan sempat Kejaksaan pada waktu itu tapi setelah kita jelaskan kepada ,mereka sudah ada pemahaman yang baru. Kadang-kadang ya biasa lah ahli hukum iya kan, kalau nggak berbeda pendapat ya bukan ahli hukum itu ahli yang lain lah kira-kira begitu. Nah soal Jaksa katakan begini, pengacara katakan begini, yang benar Hakim memutuskan begini kan begitu.

Lapas Pekalongan Pak Arsul ini klasik, kita sudah anggarkan 22 miliar pada waktu itu karena kondisinya tanah rob asal rob pasti banjir tapi terjadi *refocusing* itu memang mau tidak mau kita ada prioritas karena kalau kita bangun itu kena Covid semua sama saja. Jadi dana Covid waktu itu ada *refocusing* dan tanah yang diberikan pemerintah kebetulan tidak justru lebih besar nanti biaya pematangannya, justru lebih besar nanti biaya pematangan dari pada cari yang baru gitu jadi mubazir juga Pak Arsul. Jadi kalau bisa Pak Arsul meyakinkan Pemda mencari tanah yang lebih layak akan bisa kita lakukan karena itu termasuk lapas Pekalongan ini termasuk yang masuk dalam skala prioritas kita karena memang asal rob pasti kejadian mungkin dalam satu tahun beberapa kali sangat parah sekali. Begitu di dekat tanahnya ada ternak ayam yang besar, polusinya, jadi memang agak kurang baik. Ya jadi kami sangat berharap karena dapilnya Pak Arsul ya pastilah bisa mencari tanah yang lebih lebih baik disana, itu kan tentang bagaimana mendekati

kepada daerah disana. Kami punya pengalaman itu Pak di Kabanjahe juga begitu.

Kita mau disuruh pindah kita pikirkan dikasih tanah di puncak gunung wah gimana kita mau bikin jalan di puncak gunung pematangannya juga begitu. Di Bagan Siapi-Api yang *over* kapasitas itu 800% itu prioritas kita dulu kita dikasih tanah disitu, sudah kita matangkan tapi rupanya nggak bisa, rawa kita sudah keluar uang, nah terakhir sekarang Bupati nya mencari tanah yang sudah matang dan tahun ini kita mudah-mudahan bisa bangun. Jadi memang kadang-kadang ada Pemerintah Daerah mengatakan kami sudah kasih tanah tapi kalau tanahnya tanah yang nggak jelas dan justru lebih mahal biaya ininya ya kan percuma saja kita melakukannya membangunnya jadi ini persoalannya jadi sambil menunggu kabar baik dari Pak Arsul.

Nah, ini soal narkoba di lapas kita sudah mengirimkan 643, sudah penuh itu disana tahun ini kami akan membangun lagi. Jadi dari DKI Jakarta 99 narapidana narkoba. Jangan pula di ini kan kejadian para pemindahan ini kan baru sekarang bisa massal kita lakukan besar-besaran. Ini Pak memindahkannya ini bukan tidak ada yang intervensi dari mana-mana, ada juga itu barang mengapa dipindahkan itu kira-kira begitu sudahlah sama-sama mengertilah saya nggak perlu ungkapkan disini ya kan kira-kira begitu, tapi karena Dirjen nya Polisi nah itu agak bisalah kira-kira begitu. Dari DI Yogya 48, narapidana Sumatera Selatan, ini akan terus *on going* kita lakukan, Sumatera Utara 54 sebelumnya sudah ada, Banten 46, Bali 18, Jawa Timur dan mengapa langsung penuh karena memang kita buat satu sel satu orang, beda kalau ditempat yang umum dia tidak satu sel bisa ini gitu kalau disana kan satu sel satu orang memang bertaubat.

Ada yang kata Pak Setjen Pak Dirjen itu ada yang minta-minta ampun menawar-nawarkan apalah kira-kira begitu, tapi kita bilang nggak bisa ini barang harus dikunci. Nah tadi kami mohon diberi tahu saja kalau ada informasi yang ini segera kita disampaikan pasti kita lakukan penindakan dan ini menjadi komitmen kita. Hanya kalau apa yang disampaikan bukan karena sesama PDI-Perjuangan sampaikan Pak Arteria narkoba itu di luar. Bandarnya itu di luar negeri tidak bisa kita tangkap kita tidak bisa seperti Amerika bisa masuk ke Kolombia, bisa masuk ke Meksiko kirim orang menangkap bandar internasionalnya. Karena pasarnya apa 5 juta lebih disini pasarnya.

Bahwa ada yang nakal di dalam itu pastilah tapi narkoba itu masuknya dari apa di luar dan tidak mudah, tidak mudah selama banyak pengguna di Indonesia dan ada pasar di dalam ini maka hukum pasar hukum ekonomi pasti berlaku dan ada orang yang sampai karena uang itu begitu besar sampai masukan barang itu ke dalam perut kan berkali ada yang dimasukan diperut, ada yang dimasukan dimesin, ada yang dimasukan dimana-mana memang, ada yang masuk dari perairan Malaysia, ada yang masuk sekarang sudah masuk lagi dari bawah kesana ke daerah-daerah lain.

Saya sudah bertemu dengan KBN yang baru kita terus kerja sama soal ini. Di dalam kalau kami sudah memecat terlalu banyak pegawai yang untuk

yang terlibat dalam soal ini, diturunkan pangkat, ada yang dipidana, kerja sama dengan Polri sekarang sudah sangat intens kita lakukan, untuk itu tetapi kalau ada tentu tidak sempurna pastilah. Saya sudah selalu katakan kalau ada di dalam satu lapas ada pengedar, ada pemakai, ada kurir itu pasar Pak, pasar. Kita tidak punya anggaran rehabilitasi itu sebabnya kan sudah kita katakan masuk prioritas nasional Pak, mohon Komisi III mendorong revisi Undang-Undang Narkotika. Supaya pemakai-pemakai itu dan negara bila perlu menganggarkan biaya rehabilitasi subsidi bagi orang-orang yang tidak tadi ada kaitannya ini dengan yang disampaikan Pak Arteria.

Misalnya soal arus asimilasi terintegrasi, bagi teman-teman pengacara tahu benar tipisnya mengkurirkan dengan mempekerjaikan tergantung xyz mau kurir, mau pemakai itu sangat tipis sekali. Diskresi ini yang membuat ketidakadilan yang terjadi. Kan selalu saya katakan Pak kalau disuatu negara satu jenis pidana itu melebihi 50% padahal ada pidana pencurian yang biasanya paling banyak pidana perkosaan, pidana kekerasan, pidana ini tetapi di dominasi oleh satu jenis *crime this is something wrong* sudah pasti *something wrong*. Apakah ada dalam ketentuan perundang-undangannya yang perlu dikoreksi, apakah apa, karena melawan narkoba ini ya memang harus tidak bisakannya dari lapas emangnya kalau,

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pimpinan sedikit Pimpinan, terkait tadi penjelasan Pak Menteri.

Pak Menteri apa yang disampaikan Pak Menteri itu sangat logis sekali dan kita juga bisa memahami kawan-kawan yang bekerja di lapas. Hanya terkadang memang ada yang sifatnya insidental yang membuat kita berpikir panjang dan melebar seperti yang terjadi di Polda Reserse Riau ketika ingin hendak masuk di lapas nah ini menjadi viral. Kenapa Polisi dilarang masuk ke dalam untuk memeriksa atau melihat pelaku salah satu pelaku narkoba di dalam. Viralnya ini kemana-mana seakan-akan karena viralnya video ini terjadi miskomunikasi antara pihak lapas dengan Kepolisian sehingga mereka-mereka semua kita ini bahwa ada apa di dalam.

Alasan dari lapas mengatakan bahwa ini hari libur nah emangnya hari libur tidak bisa dilihat itu orangnya jangan-jangan orangnya tidak ada di dalam. Inilah tetapi apa pun namanya Pak Menteri tidak gampang memang kira-kira berbuat sesempurna mungkin untuk memberikan kesempurnaan dalam pekerjaan kita tetapi apa pun itu kita memberikan apresiasi kepada kawan-kawan kita yang bekerja disana siang dan malam dia jaga terus disana. Saya kira itu. Terima kasih.

F-PDI.P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua Pak Ketua pertama

KETUA RAPAT:

Sebentar kita selesaikan Pak Menteri nanti saya tambah sesi

F-PDI.P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya makanya Pak Ketua, Pak Ketua saya meminta ketegasan Pak Ketua memimpin rapat. Ini kan tadi diinterupsi diterima. Saya hanya ingin mengatakan biarkan Pak Menteri ngomong dulu baru nanti ditanggapi.

KETUA RAPAT:

Iya-iya cukup-cukup biar Pak Menteri bicara.

F-PDI.P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Saya juga ingin Pak Supri ini kan pengacara kan tahu tidak hanya melakukan penegakan hukum tapi bagaimana menjaga lapas itu tertib tidak rusuh, 800 orang dijaga cuma 9 orang Pak udah bagus nggak rusuh itu juga harus dihadirkan disitu Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Arteri cukup. Pak Menteri silakan lanjutkan.

F-PDI.P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Saya minta kita proporsional ini disini Pak.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Baik terima kasih-terima kasih.

Sama-sama tujuannya baik jadi memang udah pasti dengan *over* kapasitas penyakit Pak. Kalau HIV memang itu kan para pengguna yang Pakai apa itu dari dap hanya ada *treatment-treatment* untuk HIV, TBC ya dan Covid mudah-mudahan boleh kita katakan bahwa ada yang meninggal. Dengan jumlah *over* kapasitas yang demikian Pak, dulunya kita bayangkan lapas itu akan menjadi kuburan masal tapi oleh karena oleh karena kita betul-betul, karena kalau sempat saat terpapar disitu Pak dan kalau kita tidak mengambil tindakan cepat kita membuat kamar-kamar isolasi dan lain-lain itu bisa bahaya sekali, tapi dengan tindakan-tindakan bisa kita lakukan.

Saya hanya mau sampaikan Pak seharusnya saya ke Jepang tanggal 7 yang lalu. Diundang khusus disamping menghadiri sidang PBB tentang kriminal dan keadilan juga diundang UNO DC untuk mempresentasikan bagaimana kebijakan kita yang Permenkumham integrasi dan reintegrasi, itu diapresiasi Pak oleh dunia internasional yang saya presentasikan seharusnya saya presentasikan di Jepang tetapi oleh karena Covid protokolnya saya sangat ketat saya akhirnya menyampaikannya secara virtual.

Mereka betul-betul mengapresiasi apa yang kita lakukan itu. Kita terakhir mengeluarkan itu sampai 65-70 sekian ribu Pak dan kita tidak memasukan, nah kami jadi bertengkar dengan Polisi dan Jaksa. Kita menahan beberapa kasus yang masuk karena inkrah membawa Covid jadi

kita betul-betul harus menjaga. Sekarang memang harus kita akui tahanan di kantor Polisi, Jaksa, itu membludak Pak. Jadi ini kalau habis Covid nanti ini akan airbah lagi masuk ke lapas klasik lagi persoalannya. Jadi ini yang kami minta bantuan dan teman-teman memang persoalan dan apa yang paling banyak itu ya kita kemarin di Riau melihat 500 ditangkap itu 500-600 atau berapa itu yang terakhir ini di tv kita lihat wah itu bakalan masuk ke dalam itu. Untuk di Riau masuk segitu banyaknya menjadi persoalan tersendiri buat kita, tapi namun demikian ya memang penegakan hukum harus dilakukan.

Yang pertanyaan yang mengenai buronan interpol sudah Pak sudah keluar dan itu di orangnya kita petugas yang lalai kita tindak dan orangnya sudah ditangkap dan dimasukkan di lapas menunggu deportasi, sudah kita lakukan. Bahwa ya di beberapa tempat banyak juga teroris-teroris yang sudah menyatakan kesetiaan ke negara kita. Banyak dan yang kalau sudah begini memang kita kerja sama juga dengan BNPT, dengan Densus dan terus meminta program-program deradikalisasi kepada WBP-WBP kita.

Di Kalteng ada lapas yang kurang fasilitasnya nanti kita pikirkan bu, ini kan anggaran kita terbatas bu kalau ada uangnya kadang begini bu kalau bisa berkomunikasi dengan Pemda tidak ada salahnya Pemda ikut berkontribusi nanti dihibahkan ke kita. Misalnya contoh di Kota Bekasi mereka membangun kantor imigrasi dan membangun block-block lapas ke kita dan itu dihibahkan, Boyolali ya Boyolali. Jadi sebetulnya bisa Pemda bisa membantu karena kan warganya juga, karena kalau ditunggu kita, kita akan selalu prinsip kita akan melihat persoalan dulu yang super prioritas contoh Pekalongan rob dan lain-lain, yang *over* kapasitas Bagansiapiapi yang betul-betul memang harus itu prioritas kita begitu. Daerah-daerah yang secara bertahap keterbatasan anggaran ini juga tahun ini masih ada kemungkinan *refocusing* terpaksa kita harus melihat secara baik mana skala priotas yang hendak kita lakukan.

Terima kasih nanti kami sampaikan Pak mengenai RUU Pangan Badan Ketahanan Pangan, disampaikan kepada Kementerian terkait mengenai hal ini. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ateria berkaitan dengan ini ya. Tentunya amanat Undang-Undang akan harus dilakukan. Saya nggak tahu bagaimana pembahasannya di Kementerian Pertanian mengenai hal ini dan tentunya nanti kami sampaikan, tentu ini berkaitan dengan Kementerian Pertanian juga termasuk Kemenpan RB. BPHN kita banyak melakukan penelitian-penelitian Pak. Barangkali dapat diaskes hasil-hasil penelitian mana Pak ibu Bapak. Kan ada akses hasil-hasil penelitian kita melalui aplikasi ya di aplikasi di balitbang.go.id dan itu penelitian-penelitian kita dari buku-bukunya hasilnya semua.

Baik memang misalnya Undang-Undang ITE tapi banyak penelitian yang kami juga buat berkaitan dengan penelitian yang ada kami minta supaya mendukung kebijakan kita. Artinya sebelum kita mengambil kebijakan kita perlu mengambil penelitian tentang satu hal dari penelitian yang berfokus *policy oriented* disamping tentunya isu-isu yang ada dalam publik, terima kasih masukannya.

Pandeglang belum ada ini dari Ibu Sri Yuliati, oh Ibu Ade Rosi *sorry*. Ini karena Ade ini memang. Memang Perda-Perda kami kita terus melakukan pemantauan dan pengawalan. Kami saya sudah memerintahkan kepada seluruh Kakanwil melalui Dirjen PP untuk terus mendampingi Pemerintah Daerah dalam proses harmonisasi, khususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini sudah kami sampaikan juga dan memang di beberapa daerah kita kekurangan para perancang tetapi kalau perlu dari Dirjen PP bisa kita kirimkan. Ini menjadi perhatian kita khusus Ciptaker supaya sesuai kalau tidak mubazir apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi PP-nya sudah 45, Perpresnya 44 semua 49 nah turunannya pasti ada di daerah.

Nah itu sebabnya kami mengawal keras tentang ini Perda-Perda di daerah. Kami sudah meminta para Kakanwil melalui *law center* kita untuk memberi perhatian secara khusus ini dan di berbagai kesempatan kalau saya misalnya dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja ke beberapa daerah yang sudah kita lakukan ke Manado, beberapa ke Sumatera Utara dan beberapa daerah selalu mengingatkan kalau dihadiri oleh Gubernur dan Kepala-Kepala Daerah yang lain kami ingatkan supaya turunan Perda-Perda yang berkaitan dengan Cipta Kerja betul-betul dilihat ketentuan di atasnya supaya jangan mubazir nanti dibatalin.

Tentang pengawasan kalau soal Covid jadi *entry* nya pertama itu adalah karantina kesehatan KKP, lolos dari KKP baru ke kalau tidak lolos di KKP tidak boleh masuk imigrasi, kalau tidak lolos kembali. Jadi ini protap kita jadi kami hanya mengawasi soal keimigrasiannya orang ini masuk benarkah orang ini masuk sudah punya visa, apakah masuk dalam kategori dokter apa punya persyaratan yang lengkap untuk masuk ke Indonesia tapi soal Covidnya adalah kewenangan dari KKP tapi tetap kita berkordinasi dengan mereka. Namun demikian kami akan sampaikan nanti barang kali kami akan secara khusus menyampaikan ini kepada satgas Covid dan KKP di bandara-bandara kita melalui staf-staf kita di imigrasi untuk betul-betul ketat dalam soal ini.

Benar bahwa ya kita kalau sempat semua yang di sama dengan narkoba bu pemakai itu yang ditengarai itu 5 jutaan kalau 10% saja kita masukin ke dalam 500 ribu sudah mabok kepayang kita. Sekarang saja 250 kita sudah nggak sanggup. Kalau yang narkoba saja 10% diambil jangankan 10% ambil 5% 250 ribu. Makanya kalau pengguna itu memang ya di rehab lah. Jadi kalau 50 juta ditengarai pemakai ketergantungan atau pemakai baik di *club* dimana-mana ini secara matematik sudah bisa kita hitung angka konsumsi perhari berapa, 5 juta Pak *sorry* 5 juta. Konsumsi perhari berapa, dari mana itu barang kan ini kan persoalan yang sangat gede sangat, kalau ditangkap 1 ton hitungannya bagaimana, yang lolos berapa ton untuk yang kita katakan pemakai-pemakai jadi memang-memang kompleks. Jadi itu yang kita katakan memang penanganannya memang harus holistik dalam soal ini.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri waktu saya perpanjang dulu 30 menit.

(RAPAT: SETUJU)

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Oke soal notaris Pak kita sedang menyusun ketentuannya ini ada Dirjennya ini. Nah dalam hal Notaris Permen 27 Tahun 2016 tentang Formasi Notaris itu mengatur daerah di CBA jadi penempatan pertama di D tiga tahun dan ada salah-salahnya berapa aktenya baru ke C, C ke B, B ke A. Nah kita sekarang sedang menyiapkan Permen baru yang mengatur supaya tidak terlalu empat jadi cukup C, B, A jadi memotong jenjang bagi Notaris untuk menuju wilayah kerja yang dituju. Nah tadi diangkat oleh Pak Arteria soal tiba-tiba saham hilang, ini paling parah. Kami banyak menemukan soal ini dan ini hanya mungkin terjadi kalau Notarisnya juga main. Saya dalam beberapa kali kesempatan selalu mengatakan karena apa persaingan, Notaris ini menjadi sangat.

Memang ada juga Notaris-Notaris yang punya *habbit* ya mohon maaf memang. Orang-orang seperti banyak mencari Notaris-notaris bukan siapa yang profesional, siapa yang bisa. Banyak sekali kasus-kasus itu sebabnya dalam berbagai baik dalam pertemuan ini pertemuan-pertemuan saya selalu mengatakan keprihatinan saya tentang soal-soal yang menyangkut dengan integritas dalam membuat akte-akte. Bisa Pak yang nggak jelas-jelas KTP-nya bisa. Ini saya baru terima ini soal mafia tanah setelah di cek KTP-nya tidak benar dan lain-lain. Ini baru masuk saya Notarisnya ini perlu kita tindak yang begini-begini jadi memang persaingan-persaingan seperti itu, tapi apa yang Bapak sampaikan ini kita dengar nanti kita catat tentang kita akan segera melakukan penyesuaian.

Jadi penentuan wilayah ini adalah jumlah penduduk, kegiatan dunia usaha, intensitas apa yang ada disana nanti pembagiannya akan kita lihat, dengan demikian penentuan jumlah Notaris akan bisa lebih baik. Karena kami sudah pernah mencoba karena produksi Notaris ini terus berjalan dari kampus-kampus. Dulu maksud kami mohon maaf maksud kita dulu supaya menyamakan kualitas Notaris itu kita membuat ujian kompetensi tapi kita digugat kalah, sedangkan pengacaranya punya ujian kompetensi.

Kalau di luar negeri walaupun sudah sekolah di Amerika itu kalau sudah sekolah *lawyer* pun dia harus lulus baru *examination* baru bisa menjadi *lawyer*. Dulu Peradi sangat ketat soal ini tapi sekarang kan Peradi ada masalah. Dulu Peradi itu untuk menjadi pengacara sudah tamat sarjana hukum, sudah lulus hukum acara, sudah lulus dan lain-lain ya tetap harus untuk menjadi pengacara harus lewat uji kompetensi untuk apa, untuk membuat kesamaan. Karena kami kalah maka kita buat sekarang

pembobotan, pembekalan ya modelnya hanya pembekalan, tapi kan kalau pembekalan kan tidak terlalu kuat. Itu yang kita katakan saya kira kita harus terus mencari jalan-jalan yang terbaik untuk peningkatan kualitas dan integritas para Notaris kita.

Terima kasih bahwa tadi saya katakan bahwa kami akan terus mengevaluasi Permenkumham tentang Integrasi dan reintegrasi tetapi yang paling penting barang kali menurut kami juga salah satunya adalah revisi Undang-Undang Narkotika nanti kita bahas tentunya di Komisi III, kita sudah buka data saja semua kita lihat bahas secara mendalam dari hati ke hati sebetulnya persoalan narkoba ini apa, membludaknya lapas itu karena apa. Kalau saja tidak ada PP 99 soal Narkoba, dulu hampir sepakat Pak.

Ini kan sudah memotong barang kali sekarang jumlah, jumlah lapas itu mungkin hanya tinggal 200, 200 mungkin kurang. Karena ada orang yang jadi kurir itu dihukum 5 tahun tidak dapat remisi, yaudah 5 tahun kita biyai, padahal dia hanya menjual 0,0 sekian, 5 tahun Pak kita biyai dia tidak dapat remisi kecuali dia *justice collaborator* mengurus *justice collaborator* tidak gampang apalagi kalau dia hanya kurir orang-orang yang tidak apa, dia tidak tahu siapa yang menyuruh dia, dia hanya dititipi ini menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi, tapi saya percaya ini bisa nanti kalau sudah masuk di Komisi III kita betul-betul mendalami apa sebetulnya yang di dalam itu.

Kami akan terbuka dengan data ya kami akan terbuka dengan data. Haki ya terima kasih memang kan sistem kita dulu itu siapa yang duluan mendaftar. Ini yang soal merek dan lain-lain ini, Ikea terakhir ya untung bisa diselesaikan. Jadi milik-milik orang ada orang-orang yang mempunyai itikad jahat sebetulnya kalau sudah ada itikad jahat sudahlah tapi dengan ketentuan-ketentuan yang baru sekarang bisa kita ini kan.

Setuju barang kali ya soal Mahkumjapol, ada baiknya nanti rapat-rapat di dengan saya, saya setuju Pak. Nanti rapat dengan Polri sampaikan lagi, rapat dengan Jaksa Agung sampaikan lagi nah Mahkamah Agung walaupun mungkin dalam forum konsultasi Komisi III disampaikan itu sehingga kita duduk bersama. Banyak hal yang bisa kita urai walaupun misalnya kita tidak merevisi PP 99 soal narkoba dulu. Kalau Mahkumjapol dengan Komisi III duduk kita buat kesepakatan itu pembatasan antara kurir, pemakai, penggunaan, pasalnya yang ini, ini barang kali bisa mengurangi potensi-potensi yang ada.

Saya setuju Pak nanti tapi kan bukan itu baiklah itu dari Komisi III yang menginisiasinya sehingga dengan kesepakatan itu kita bisa duduk bersama. Nggak perlu *gede-gede* barang kali melalui poksi untuk mengambil jadi masing-masing Fraksi di wakili satu Kapoksi dan satu yang diutus duduk kita bicara *roadmap* atau apa saja yang bisa kita selesaikan bersama. Saya sangat sepakat dan ini akan memudahkan kami juga. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Pak Ketua kalau ada lagi tambah-tambahan kami ucapkan terima kasih.

*Wallahulmuafiq Illa Aqwamthoriq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Terima kasih tidak ada pertanyaan tentang KLB Demokrat terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya sesi selanjutnya mungkin ada dua sesi lagi ini Bang Benny sama Bang Adies Kadir mau menyampaikan kepada Pak Menteri. Silakan Bang Benny duluan kalau ada yang disampaikan.

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Terima kasih Pak Ketua.
Tadi berkali-kali disebut ini umpan-umpan kita.

Yang pertama terima kasih banyak saya dikasih kesempatan. Tadi saya mau menginterupsi sebetulnya Pak Menteri ya soal narkoba tadi. Apa memang ada transaksi narkoba di lapas itu pertanyaannya. Kalau ada bagaimana masuknya, itu pertanyaan publik kan gitu Pak. Kok bisa ya transaksi narkoba di dalam lapas, yang kedua ko bisa ya Polisi nggak bisa masuk ke dalam kan begitu Pak, seolah-olah Dirjen Lapas ini tugasnya untuk mengawal orang-orang melakukan transaksi di dalam lapas kan gitu kesimpulan-kesimpulan yang bisa dibangun kan banyak sekali kesimpulannya Pak Menteri.

Itu saya nyambung Pak saya tidak bertanya sebetulnya cuma saya pikiran saya lagi nggak tenang terganggu gitu, cuma terganggu tadi narkoba ini ya saya langsung tanya.

Yang kedua saya menyampaikan aspirasi teman-teman kader Partai Demokrat, aspirasinya teman-teman semua berdoa supaya Bapak Menteri dan Pak Wakil Menteri diangkat jadi Pak Wamen ini sahabat kita ini. Saya tahu beliau jadi Wamen setelah beliau ngomong soal hukuman mati itu yang tadi itu. saya ingat betul sebelumnya saya tidak tahu kan lalu saya baca wah bagus juga *statementnya* tapi bukan *statementnya* tapi saya lihat oh Pak sudah jadi Wamen kan gitu Pak profesian untuk itu.

Saya sambung tadi ya Pak lupa lagi tadi saya apa. Oh iya saya, menyampaikan apresiasi teman-teman, aspirasinya semua berdoa teman-teman sudah sampaikan tolong sampaikan Pak Benny kami semua berdoa lintas agama, lintas kultural. Doa apa lagi saya bilang untuk Bapak Menteri, supaya beliau sehat, jauh dari Covid, sehingga pikiran tetap terang kan gitu tetap cerdas bisa menyelesaikan semua masalah termasuk masalah bangsa apa pun kan begitu. Dan yang ketiga doanya supaya tetap tegak lurus dengan hukum kan begitu, selesaikan semua masalah dengan hukum itu doa mereka, masalah apa saja. Ya kalau ada masalah yang berkaitan dengan kami ya tentu itu juga di dalamnya doanya kan begitu Pak, iya kan doa ya Pak Menteri sudah tahulah ya masa ajakin lagi ikan berenang kan nggak bisa *dong* Pak. Kami mohon Pak, kami berdoa Pak Menteri Menkum dan HAM bisa tegakan

aturan dengan semesti-mestinya kan begitu Pak. itu saja si doa kami Pak yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih banyak Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Baik Bang Benny *Insyah Allah* lah Pak Menteri ini tegak lurus dengan hukum. Selanjutnya yang terakhir Bang Adies.
Silakan.

F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati beserta Anggota Pak Menteri beserta seluruh jajaran,

Saya bantu kita bantu Pak Menteri doakan Pak Benny juga semoga selalu sehat dan selalu tabah menghadapi cobaan.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Pak Adies dan saya sudah dicoba dan tiga tahun Pak Benny.

F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Jadi kami dulu doa-doanya nanti saya bocorin Pak, dulu kami berdoanya seperti apa nanti kita doa-doa. Pak Menteri beberapa kali kami kunjungan ke lapas diberbagai daerah. Ada satu hal yang menarik perhatian terkait dengan banyaknya permintaan alat pendeteksi *handphone*, alat pendeteksi *handphone*. Menurut mereka di lapas itu alat pandeteksi *handphone* ini sangat penting, karena *handphone* inilah yang menjadi biangnya di dalam lapas itu. Mereka sudah berupaya sedemikian hingga memeriksa itu orang masuk baik itu dari makanan, dari Pakaian apa segala macam tapi masih juga bisa bocor.

Jadi mereka minta sebagian besar itu alat pendeteksi *handphone*. Cuma pertanyaannya Pak Menteri, waktu kami tanya apakah kalau sudah ada alat itu bisa menjamin *handphone* itu tidak bisa masuk ke dalam, itu juga tidak bisa dijawab. Akhirnya mereka mengakui bahwa memang SDM mereka banyak terjadi kebocoran-kebocoran hingga masuklah *handphone* tersebut. Nah saya tidak mengerti nanti Dirjen PAS mungkin, apakah ini bagian dari alatnya atautakah bagaimana nanti memperbaiki SDM-SDM yang ada di dalam lapas tersebut. Ini memang PR kita bersama Pak Menteri jadi masukan saya saja, banyak yang minta itu tetapi tidak bisa menjamin juga apakah itu bisa masuk, apakah alat itu harus kita butuhkan atau SDM-nya kita perbanyak atau seperti apa nah inilah yang menjadi PR kita bersama-sama. Itu saja masukan yang kami dapat dari berbagai kunjungan. Terima kasih Pak Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri singkat.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Baik. Kalau soal narkoba pastilah banyak cara bahkan pernah ditemukan Pakai drone dijatuhkan ada dilempar makanan dari dapur, dari segala macam cara. Unik sekali ada yang dimasukan di pasta gigi, yang apa segala macamlah, karena memang ya di dalam itu banyak yang punya ketergantungan dan banyak yang ini, tapi kami tadi segala petugas kalau sudah mengetahui terjadi kejadian-kejadian seperti itu apalagi ini kita hukumannya sangat berat buat mereka sangat berat. Kalau yang berkaitan dengan narkoba itu pemecatan atau baik tidak hormat, dengan hormat tergantung *nature* dari apanya kejahatannya atau turun pangkat, bebas jabatan dan lain-lain.

Nah di beberapa tempat memang Pak Dirjen seperti di Kalimantan ya ada *miss* komunikasi tetapi kalau sekarang sudah cukup baik. Artinya kalau operasi-operasi seperti itu kalau memang betul-betul diperlukan kordinasi, kadang-kadang dibawah ini boleh kita katakan protap ada yang sangat ketat dengan protap, ada juga yang memang main, tapi kalau terjadi seperti itu dan ternyata dia main itu tindakannya sangat jelas dan konkrit Pak Ben. Jadi tidak usah disanksikan apalagi sekarang baik dengan BNN maupun dengan Polri, dengan Pak Dirjen sudah melakukan kerja sama koordinasi mengenai hal itu.

Aspirasi kader Demokrat terima kasih Pak Benny berdoa terima kasih doanya saya sehat. Saya sehat saya nggak tahu yang sebelah sana berdoa juga mana yang di dengar nanti itu. Ini kan sama-sama berdoa pastilah tapi yang pasti kita akan melakukan semua sesuatunya dengan ketentuan hukum yang berlaku itu sudah pasti, iya itu sudah pastilah. Kan yang kita hanya inginkan bahwa janganlah dituduh-tuduh kita ini langsung, belum-belum saya belum pernah ketemu sudah dibilang oh Menkumham sudah begini, aduh berat deh. Jadi ada urusan pribadi, ada urusan orang punya politik dan lain-lain tetapi kita aturannya jelas kok aturannya jelas, diserahkan saja kita akan mengambil keputusan secara profesional. KLB sudah memasukan dua hari lalu sore-sore diterima oleh Dirjen AHU, tentunya saya tidak sama seperti yang pertama Pak AHY dan Pak Benny datang diterima Dirjen AHU saya ada ini.

Tentunya kalau saya yang menerima KLB nanti pasti ada insiniasi lagi ya tetap diterima Pak Dirjen dan menerima dibuat tanda terima kita akan pelajari betul-betul secara baik, seksama dan apa. Kalau betul-betul itu tidak sesuai hukum, tidak sesuai BRT kita mengambil keputusan itu tapi kalau sesuai pula bagaimanalah ku mengambil mengambil keputusannya lagi kan. Tapi yakin dan percaya saja Pak Ben, apalagi sudah didoakan tadi ya aman lah. Saya kira itu saja komentar saya terima kasih atas perhatiannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik Pak Menteri sebelum kita masuk ke rancangan kesimpulan saya sedikit ada koreksi. Halaman 7 baris ke 5 disana ada kesalahan pembahasan Rancangan Undang-Undang dilaksanakan terhadap 5 RUU, 5 diantaranya telah diundangkan yang Rancangan Undang-Undang KUHP dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan ini kan belum Pak hanya koreksi. Baik silakan tampilkan untuk kesimpulan.

1. Komisi III DPR RI dan Menkumham RI bersepakat untuk melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi legislasi dengan memprioritaskan kembali penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang KUHP dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan, serta penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang KUHP dan kebutuhan Rancangan Undang-Undang terkait lainnya yang sudah termasuk dalam prolegnas sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

Mungkin ada koreksi. Setuju ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi III DPR RI mendukung Menkumham RI untuk melaksanakan rencana prioritas kerja tahun 2021 dibidang pamasarakatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan *over crowded over* kapasitas, termasuk dalam meningkatkan pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran narkoba, serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasarakatan.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi III DPR RI mendukung Menkumham RI dalam pelaksanaan rencana prioritas kerja Kemenkumham 2021 di bidang imigrasi, terutama untuk meningkatkan inovasi layanan publik dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas orang di berbagai tempat perlintasan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan pengawasan orang asing.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi III DPR RI mendukung Menkumham RI untuk meningkatkan efektifitas forum Mahkumjakpol terutama dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum seperti penegakan tindak pidana narkoba dan penerapan keadilan restorative

Silakan Pak Menteri.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Izin Pak.

DPR RI dulu atau kita? Saya kira kan tadi ada baiknya tadi saran Pak Arteria Komisi III bersama DPR RI. Komisi III bersama Menkumham RI untuk membuat forum Mahkumjakpol forum bersama untuk menyelesaikan permasalahannya, iya, iya, dengan mitra nggak ada para. Dalam rangka penyelesaian apa tadi, iya berbagai permasalahan hukum seperti dan lain-lain. Dalam rangka penyelesaian iya, iya dalam rangka ya, yaudah-udah. Dalam rangka barang kali itu, dalam rangka menyelesaikan terutamanya hilang. Ada Mahkamah Agung oh kalau konsultasi rapat Pimpinan.

KETUA RAPAT:

4. Komisi III DPR RI bersama Menkumham RI bersepakat untuk meningkatkan efektivitas forum Mahkumjakpol melalui rapat kerja gabungan Komisi III DPR RI dengan mitra kerja terkait dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan hukum seperti penanganan tindak pidana narkoba dan penerapan keadilan restoratif.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia

Sebelum rapat ini kita tutup Komisi III DPR RI akan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan kewenangan Kemenkumham untuk dapat ditindak lanjuti. Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM dapat menyampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada raker atau masa sidang berikutnya. Dengan telah berakhirnya atau dengan selesainya pembicaraan seluruh materi rapat pada hari ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja pada hari ini. Sebelum rapat kerja ini kami tutup kami mintakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan *closing statement*.

Silakan Pak Menteri.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat

Saya atas nama teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih atas rapat kerja ini dan pembicaraan yang sangat efektif dan bersahabat dan tentunya ini semua demi kebaikan penegakan hukum dan pelayanan hukum di masyarakat kita. Tadi sesuai komitmen kita hanya meleset setengah jam saja, tadi kita putuskan jam 12 meleset setengah jam. Ini spektakuler ini terima kasih banyak Pak Ketua, mudah-mudahan kedepannya kita terus meningkatkan kerja sama dan kami mengapresiasi dan meminta dukungan dari Komisi III untuk tetap membantu Kementerian Hukum dan HAM, tentunya bidang pengawasannya juga agar apa yang kami lakukan betul-betul dapat sesuai dengan ketentuan hukum dapat melayani publik dengan baik dan berguna bagi masyarakat.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Menteri kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI baik secara fisik maupun secara virtual, Pak Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran. Demikian, rapat hari ini kami tutup dengan mengucapkan *alhamdulillahirobil alamin*.

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 12.30 WIB)

Jakarta, 17 Maret 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001